

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketahanan nasional merupakan kemampuan suatu bangsa untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan, integritas wilayah, nilai-nilai kultural, serta kepentingan nasionalnya dari segala bentuk risiko dan tantangan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Aspek-aspek kehidupan negara yang terlibat dalam ketahanan nasional mencakup kestabilan politik dan keamanan ekonomi, keamanan sosial, keamanan lingkungan, serta keamanan militer. Ancaman terhadap ketahanan nasional merujuk pada keadaan atau kondisi yang menimbulkan risiko terhadap stabilitas, keamanan, dan kelangsungan hidup suatu negara. Ancaman ini dapat timbul baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, melibatkan sejumlah aspek kehidupan negara, seperti bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Ancaman nasional dapat berupa ancaman militer, seperti konflik bersenjata, invasi, atau serangan teroris yang dapat mengancam kedaulatan dan integritas negara. Selain itu, ancaman ekonomi seperti krisis keuangan, inflasi yang tinggi, atau penurunan pertumbuhan ekonomi dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Adi, 2018).

Ancaman sosial seperti konflik antar etnis, agama, atau kelompok sosial, serta ketidakadilan sosial, kemiskinan, dan ketimpangan sosial juga dapat menjadi ancaman nasional. Ancaman lingkungan seperti perubahan iklim, polusi, kerusakan ekosistem, dan kelangkaan sumberdaya alam juga dapat membahayakan keberlanjutan negara. Untuk menghadapi ancaman nasional, negara perlu memiliki strategi dan kebijakan yang komprehensif yang melibatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Upaya ini meliputi penguatan pertahanan dan keamanan, pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan sosial, perlindungan lingkungan, dan pengembangan teknologi keamanan

informasi. Selain itu, diplomasi, negosiasi, dan kerjasama internasional juga penting dalam mengatasi ancaman nasional (Pranowo, 2010).

Pada ketahanan nasional memiliki kaitannya dengan Keamanan maritim adalah elemen krusial dalam menjaga kedaulatan dan kelangsungan hidup suatu negara yang memiliki wilayah perairan. Dalam kerangka ini, ketahanan nasional melibatkan usaha untuk melindungi dan mempertahankan keamanan di perairan negara, termasuk tetapi tidak terbatas pada laut territorial, zona ekonomi eksklusif, dan perairan kepulauan. Keamanan maritim melibatkan perlindungan terhadap ancaman yang dapat muncul di laut, seperti serangan teroris, pencurian atau perampokan di laut, perdagangan ilegal, penyelundupan senjata atau narkoba, serta aktivitas ilegal lainnya yang dapat merusak stabilitas dan keamanan perairan negara. Selain itu, keamanan maritim juga melibatkan pengawasan dan penegakan hukum di perairan negara untuk mencegah pelanggaran hukum, seperti penangkapan ikan yang ilegal, pencurian sumber daya alam, atau pelanggaran terhadap peraturan lingkungan (Al Syahrin, 2018).

Untuk mencapai ketahanan nasional dalam bidang keamanan maritim, diperlukan upaya kolaboratif antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, angkatan laut, industri maritim, serta masyarakat sipil. Upaya ini meliputi peningkatan kemampuan pengawasan dan patroli di perairan, pengembangan infrastruktur maritim, peningkatan kapabilitas angkatan laut, serta peningkatan kerjasama internasional dalam hal informasi intelijen dan penangkapan bersama. Selain itu, penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum di perairan negara. Melalui peningkatan kesadaran masyarakat, pelatihan nelayan, dan partisipasi aktif dalam program pengawasan dan pemantauan, dapat tercipta lingkungan maritim yang aman dan terjamin keberlanjutannya. Dengan menjaga keamanan maritim, negara dapat memastikan bahwa wilayah perairannya tetap aman, sumber daya alamnya dilindungi, dan kegiatan ekonomi di sektor maritim dapat berjalan lancar dan

dapat menjaga ketahanan pangan di wilayahnya. Berkontribusi pada stabilitas dan keberlanjutan nasional secara keseluruhan (Bastari, 2021).

Ancaman nasional yang berkaitan dengan ketahanan pangan menjadi isu yang semakin mendesak dan perlu mendapatkan perhatian serius. Ketahanan pangan mencakup kapasitas suatu negara untuk secara berkelanjutan dan merata memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Namun, ada beberapa ancaman yang dapat mengganggu ketahanan pangan suatu negara. Salah satu ancaman utama adalah perubahan iklim. Perubahan iklim menyebabkan cuaca yang ekstrem, seperti kekeringan, banjir, dan badai yang dapat merusak produksi perikanan tangkap. Pola curah hujan yang tidak teratur dan peningkatan suhu juga dapat mempengaruhi perikanan tangkap. Hal ini mengakibatkan penurunan produksi pangan dan ketidakstabilan pasokan pangan. Jika suatu negara terlalu bergantung pada impor pangan, pangan pokok maka akan rentan terhadap fluktuasi harga global dan gangguan pasokan (Bastari, 2021).

Ketahanan pangan salah satu sektor penting adalah bidang perikanan yang melibatkan ketersediaan ikan dan produk perikanan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk, sementara pertumbuhan perekonomian melibatkan pembangunan sektor perikanan yang berkelanjutan dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara. Salah satu ancaman yang dihadapi adalah penangkapan ikan berlebihan dan tidak berkelanjutan. Praktik penangkapan yang tidak terkendali, seperti penangkapan dengan alat tangkap yang merusak, penangkapan ikan yang belum dewasa, dan penangkapan di luar batas wilayah perikanan yang ditetapkan, dapat mengancam kelangsungan sumberdaya perikanan. Hal ini mengakibatkan penurunan jumlah tangkapan ikan, hilangnya mata pencaharian nelayan, dan kerugian ekonomi yang signifikan. Selain itu, degradasi habitat laut juga menjadi ancaman serius. Pencemaran air laut, kerusakan terumbu karang, dan penurunan keanekaragaman hayati laut dapat mengganggu ekosistem laut dan mengurangi produktivitas perikanan. Hilangnya habitat pertumbuhan ikan dapat mempengaruhi

reproduksi dan populasi ikan secara keseluruhan (Adam, 2008).

Ancaman terhadap ketahanan pangan perikanan juga berdampak pada pertumbuhan perekonomian. Sektor perikanan yang tidak berkelanjutan menghambat potensi ekonomi yang dapat dihasilkan dari sumberdaya perikanan yang berlimpah. Hilangnya lapangan kerja dan pendapatan yang dihasilkan dari sektor perikanan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi negara dan menyebabkan ketimpangan sosial. Untuk mengatasi ancaman ini, diperlukan upaya yang terkoordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, perlindungan habitat laut, dan penegakan hukum yang ketat terhadap praktik penangkapan yang merusak perlu ditingkatkan. Selain itu, investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi perikanan, pengembangan infrastruktur perikanan, dan pemberdayaan nelayan melalui pelatihan dan akses ke pasar juga penting untuk meningkatkan ketahanan pangan perikanan dan pertumbuhan perekonomian secara berkelanjutan. Untuk menghadapi ancaman ini, negara perlu mengembangkan strategi dan kebijakan yang berfokus pada ketahanan pangan. Diversifikasi perikanan, pengembangan teknologi perikanan yang inovatif, dan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan menjadi langkah penting untuk mengatasi ancaman ini. Selain itu, investasi dalam infrastruktur perikanan, pendidikan perikanan, dan perluasan akses terhadap pasar juga diperlukan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional (Adam, 2008).

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang fokus pada pembangunan kelautan sebagai tujuan utama negara poros maritim dunia, perkembangan sektor perikanan menjadi elemen penting dalam mencapai keberhasilan pembangunan kelautan tersebut. Identitas maritim yang kuat Indonesia diperkuat oleh peranannya dalam poros samudera global. Meningkatnya pengaruh nelayan pada poros maritim dapat menjadi salah satu faktor penyeimbang perekonomian Indonesia. Keterikatan pada budaya darat membuat masyarakat kurang tertarik pada isu kelautan. Di

sisi lain, meningkatnya pengaruh dalam sektor maritim dapat menjadi alat bagi Indonesia untuk meraih posisi yang unggul dan berpengaruh di panggung perekonomian regional maupun internasional. Oleh karena itu, pengembangan konsep berkelanjutan diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan pembangunan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan daripada eksploitasi (Rendi P. & Dian V. S. 2019).

Salah satu sumber daya alam hayati Indonesia adalah sektor perikanan yang mencakup berbagai kegiatan seperti penyimpanan, pendinginan, pengawetan, dan pengelolaan, sekalipun perikanan laut (ikan hasil tangkapan), dan kegiatan tersebut tidak dilakukan untuk tujuan komersil wilayah. Hal ini bertujuan untuk mendatangkan pendapatan dan keuntungan bagi masyarakat. Menurut UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh nelayan atau pihak lain untuk mendapatkan ikan atau hasil perikanan lainnya dari perairan, baik dengan menggunakan alat tangkap, peralatan, atau metode tertentu. Penangkapan ikan mencakup segala tindakan yang dilakukan untuk menangkap, mengumpulkan, atau memanen ikan atau hasil perikanan lainnya dari perairan, termasuk tindakan seperti menangkap, menarik, menyeret, mengumpulkan, atau memancing ikan. Dalam UU tersebut, penangkapan ikan juga mencakup segala kegiatan yang terkait dengan pengolahan dan pemanfaatan hasil tangkapan ikan, seperti penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, pengawetan, dan pemasaran ikan. Selain itu, penangkapan ikan juga mencakup kegiatan penangkaran ikan, budidaya ikan, dan pemanfaatan sumberdaya perikanan lainnya.

Dalam UU No. 31 Tahun 2004 juga mengatur bahwa penangkapan ikan harus dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan prinsip-prinsip konservasi sumberdaya perikanan dan perlindungan lingkungan perairan. Penangkapan ikan juga harus mematuhi ketentuan mengenai ukuran ikan minimum, musim penangkapan, dan daerah penangkapan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjaga

keberlanjutan sumberdaya perikanan. Dalam UU tersebut, penangkapan ikan juga diatur mengenai izin dan registrasi, perlindungan nelayan, pengawasan dan penegakan hukum, serta pemantauan dan pengendalian kegiatan penangkapan ikan. Hal ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya perikanan, melindungi nelayan, dan memastikan bahwa kegiatan penangkapan ikan dilakukan secara legal dan berkelanjutan.

Industri perikanan tangkap di Indonesia saat ini menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Salah satu masalah utama adalah adanya praktik penangkapan ikan secara berlebihan atau overfishing, yang membahayakan keberlanjutan sumber daya ikan di perairan Indonesia. Selain itu, permasalahan serius lainnya adalah illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU fishing) atau penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak teratur. Tindakan IUU fishing tidak hanya merugikan keberlanjutan sumber daya ikan, tetapi juga memberikan dampak negatif pada perekonomian negara. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi tantangan ini dengan menerbitkan berbagai undang-undang dan kebijakan perikanan. Salah satu undang-undang yang memiliki peran sentral dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Undang-undang ini mencakup regulasi terkait pengelolaan perikanan, metode penangkapan ikan, praktik budidaya perikanan, serta upaya perlindungan dan pengawasan terhadap sumber daya ikan. Selain Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, pemerintah juga menerapkan kebijakan-kebijakan lain, seperti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan perikanan tangkap secara berkelanjutan dan mengendalikan praktek IUU fishing.

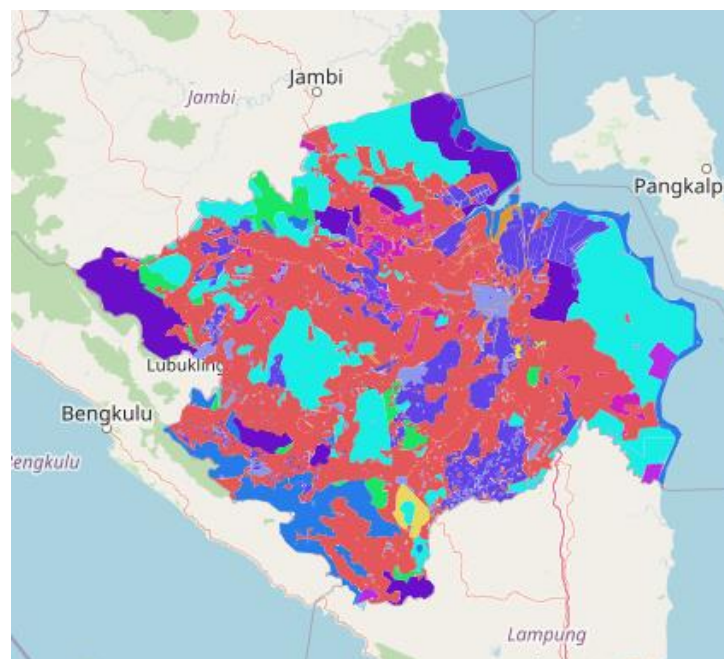
Pemerintah telah menjalin kerjasama dengan negara-negara dan organisasi internasional dalam upaya mengatasi permasalahan di sektor perikanan Indonesia. Sebagai contoh, Indonesia telah bergabung sebagai anggota dalam Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing

Practices including Combating IUU Fishing in the Asia-Pacific Region (RPOA-IUU) yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama antarnegara dalam pengelolaan perikanan. Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan pengelolaan perikanan tangkap agar lebih berkelanjutan dan melindungi sumber daya ikan di perairan Indonesia.

Dengan rencana untuk meninggalkan praktik ekonomi jangka pendek dengan tetap memperhatikan ekosistem dan keberlangsungan perikanan yang menguntungkan diharapkan dapat meminimalkan ketergantungan. Mengupayakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya perikanan sebagai bagian dari pembangunan kelautan dan perikanan adalah langkah yang diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi maksimal, sambil tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan mencegah dampak negatif seperti eksploitasi berlebihan yang mungkin terjadi akibat kegiatan ekonomi. Inisiatif ini mengejar pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dengan fokus pada perlindungan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan dan optimal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan potensi perikanan, termasuk di perairan Sumatera Selatan, dengan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan.

Provinsi Sumatera Selatan terletak di bagian selatan Pulau Sumatera, Indonesia, memiliki luas wilayah sekitar 91.592 kilometer persegi, dan merupakan salah satu provinsi dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia, dengan lebih dari 8 juta jiwa. Sumber daya alam yang melimpah, termasuk perikanan, pertanian, dan pertambangan, menjadi kekayaan alam utama di Sumatera Selatan. Sungai Musi, yang memiliki panjang sekitar 750 km, merupakan sungai terpanjang di Sumatera yang terletak di wilayah ini. Berkembang sejak zaman kerajaan Sriwijaya, dan berkembang sebagai tempat subur pertanian dan perikanan, serta menjadi pusat perdagangan antar daerah. Letak Sumatera Selatan sebagai pusat dagang memberikan keuntungan yang besar bagi provinsi ini.

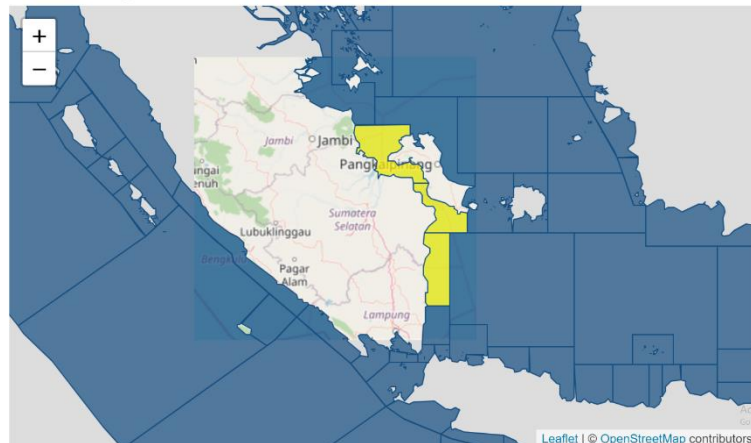
Dengan posisinya yang strategis di bagian selatan Pulau Sumatera, Sumatera Selatan menjadi pintu gerbang perdagangan antara Sumatera dengan pulau-pulau lain di Indonesia. Hal ini memungkinkan adanya aktivitas perdagangan yang cukup intens, baik dalam skala regional maupun nasional. Keuntungan ini tidak hanya berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi provinsi, tetapi juga meningkatkan konektivitas dengan wilayah lain, memperluas pasar, dan meningkatkan potensi investasi di sektor perdagangan. Topografi Sumatera Selatan sangat bervariasi dan terdiri dari berbagai jenis bentang alam. Secara keseluruhan, topografi Sumatera Selatan menawarkan beragam lanskap yang indah dan berpotensi untuk dikembangkan dalam berbagai sektor, seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan. Keberagaman topografi ini juga memberikan kekayaan alam yang melimpah dan menjadi salah satu daya tarik provinsi ini.



Gambar 1.1. Peta Pola Ruang, Walidata : PUBMTR Provinsi Sumsel
Sumber : <https://satudata.sumselprov.go.id/detail-geospasial/1>

Wilayah pesisir merupakan zona transisi antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh dinamika perubahan di daratan dan lautan. Wilayah pesisir Sumatera Selatan memiliki panjang sekitar 450 km,

membentang dari Sungai Benu (sebagai batas Provinsi Jambi) hingga Sungai Mesuji (sebagai batas Provinsi Lampung). Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Wilayah Pesisir Timur mencakup area pedesaan strategis seperti Kabupaten Vanyuasin dan Kabupaten Organ Komering Ilir. Sumatera Selatan menyimpan potensi besar dalam sumber daya perairan dan peluang usaha perikanan. Potensi ini melibatkan perairan laut seluas ± 95.000 km² dengan estimasi potensi tangkapan sekitar 256.500 ton, serta perairan umum seluas 2,5 juta hektar. Perairan umum di Sumatera Selatan mencakup danau, rawa, sungai, lebak leven, dan berbagai bentuk badan air lainnya.



Gambar 1.2. Peta Wilayah Perairan Provinsi Sumatera Selatan
Sumber : <https://maritim.bmkg.go.id/area/provinsi/?id=33>

Subsektor perikanan di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan potensi yang signifikan, khususnya dalam konteks perikanan laut. Potensi ini muncul karena provinsi ini memiliki wilayah pesisir yang diperkirakan memiliki panjang sekitar 450 km, dengan luas laut mencapai ± 95.000 km² dan potensi tangkapan sekitar 256.500 ton. Selain sumber daya laut, produksi ikan juga berasal dari perkembangan budidaya perikanan. Berdasarkan data, jumlah produksi perikanan laut di provinsi ini mencapai 54.277 Ton/Tahun dengan nilai Rp. 1.877.761.991. Sedangkan jumlah produksi perairan umum sebesar 63.460 Ton/Tahun dengan nilai Rp. 3.290.091.744.

Tabel 1.1 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap dan Jenis Penangkapan di Provinsi Sumatera Selatan, 2021

Jenis Kegiatan	Volume (Ton)	Nilai
Perikanan Laut	54.277	1.877.761.991
Perairan Umum	63.460	3.290.091.744
Total	117.737	5.167.853.735

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, Database Validasi Nasional Satu Data Kelautan dan Perikanan, 2023.

Tabel 1.2. Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2019-2021

Jenis Kegiatan	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)		
	2019	2020	2021
Perikanan Laut	92.692	64.154	54.277
Perairan Umum	104.971	61.194	63.460
Total	197.663	125.348	117.737

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan, SIPD diolah, 2023.

Pada tahun 2019, total produksi dari sektor perikanan laut dan perikanan darat mencapai 197.663 ton per tahun. Pada tahun 2020, terjadi penurunan signifikan dalam jumlah produksi menjadi 125.348 ton per tahun. Kemudian, pada tahun 2021, tercatat penurunan kembali dalam produksi dari sektor perikanan laut dan perikanan darat menjadi 117.737 ton per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan produksi perikanan tangkap pada provinsi Sumatera Selatan setiap tahunnya. Berdasarkan potensi perikanan di perairan laut Provinsi Sumatera Selatan adalah 256.500 ton/Tahun sedangkan produksi perikanan tangkap diperairan laut pada tahun 2021 hanya berkisar 54.277 Ton/Tahun, artinya belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan tangkap yang ada diperairan laut provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu potensi pemanfaatan

perikanan tangkap dilaut Sumatera Selatan masih sangat besar, Salah satu kawasan perikanan tangkap adalah kawasan pesisir Sungsang.

Wilayah Sungsang adalah suatu ekosistem muara yang kaya akan nutrisi. Ekosistem ini memiliki nilai yang signifikan bagi keberlangsungan biota perairan, termasuk ikan, udang, dan kepiting. Sebagai contoh, muara berfungsi sebagai lokasi pemijahan, perkembangbiakan, dan mencari makan ikan. Karena fungsinya yang beragam tersebut, sebagian besar warga masyarakat Sungsang berprofesi sebagai nelayan dan daerah muaranya memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Begitu memasuki kawasan ini, Anda akan langsung merasakan suasana perkampungan nelayan. Jalanan di desa Sungsang jalan seperti jembatan super panjang adalah desa tepi laut (Fauziah *et. al.*, 2011).

Wilayah Pesisir Sungsang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia, dan merupakan bagian dari Kabupaten Banyuasin yang terletak di sebelah selatan Kota Palembang. Pesisir Sungsang memiliki garis pantai yang panjang dan langsung berbatasan dengan Selat Bangka. Wilayah ini terdiri dari beberapa desa yang tersebar di sekitar muara Sungai Musi dan berbatasan dengan Selat Bangka di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Sungsang termasuk dalam Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, dan mencakup lima desa, yaitu Marga Sungsang, Sungsang 1, Sungsang 2, Sungsang 3, dan Sungsang 4. Populasi wilayah ini mencapai setidaknya 20.000 orang. Sungsang menjadi pusat Kabupaten Banyuasin II, yang terdiri dari 17 desa dengan luas wilayah mencapai 3.632 km². Selain keindahan pantainya, Pesisir Sungsang juga memiliki sumber daya laut yang melimpah. Perairan di sekitar pesisir ini menjadi habitat bagi berbagai jenis ikan dan biota laut, sementara aktivitas perikanan menjadi salah satu mata pencaharian utama bagi masyarakat setempat. Selain itu, Pesisir Sungsang juga memiliki pelabuhan yang penting dalam mendukung distribusi barang dan perdagangan di wilayah ini.

Sungsang adalah wilayah yang memiliki potensi besar sebagai wilayah penangkapan ikan. Terletak di pesisir selatan Sumatera Selatan, Sungsang memiliki perairan Wilayah Sungsang kaya akan sumber daya laut, di mana beragam jenis ikan dan biota laut dapat ditemukan di perairan sekitarnya. Masyarakat di daerah ini secara umum bergantung pada sektor perikanan sebagai sumber kehidupan mereka. Kegiatan penangkapan ikan dilakukan dengan memanfaatkan peralatan tradisional seperti jaring, pancing, dan bubu. Selain itu, beberapa masyarakat juga menggunakan perahu motor untuk memperluas area penangkapan ikan mereka. Dengan potensi alamnya yang melimpah, Sungsang menjadi salah satu wilayah penangkapan ikan yang penting di Sumatera Selatan. Kegiatan perikanan di wilayah ini tidak hanya memberikan mata pencaharian bagi masyarakat setempat, tetapi juga berkontribusi terhadap perekonomian regional dan penyediaan pangan bagi masyarakat sekitar (Fauziah *et. al.*, 2011).

Menurut Kusnadi (2002), Kondisi kemiskinan dan ketimpangan sosial di masyarakat pesisir Sungsang masih menjadi tantangan yang perlu ditangani. Meskipun wilayah ini kaya akan sumber daya alam, namun masih terdapat sebagian masyarakat yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit. Ketimpangan sosial juga terlihat dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang masih terbatas di beberapa daerah. Hal ini terlihat dari kondisi rumah yang masih kotor dan memprihatinkan. Standar pendidikan masyarakat masih rendah, sebagian besar nelayan di pesisir Sungsang hanya memiliki ijazah sekolah dasar atau sederajat. Akibat kondisi perekonomian yang kurang baik, banyak anak-anak nelayan di sepanjang pesisir Sungsang yang putus sekolah atau tidak mampu mengenyam pendidikan tinggi. Akibatnya, pengangguran di Pesisir Sungsang meningkat.

Nelayan sangat bergantung pada musim, sehingga tidak mungkin nelayan bisa melaut terus-menerus, apalagi pada musim gelombang tinggi, cuaca buruk, atau badai. Oleh karena itu, selain hasil tangkapan yang terbatas, penangkapan ikan pada musim-musim tertentu tidak dapat

dilakukan karena kemudahan alat tangkap. Keadaan ini merugikan bagi masyarakat nelayan karena apa yang mereka dapatkan dari hasil melaut masih belum mencukupi selama musim penangkapan ikan akan diolah selama di luar musim. Inilah mengapa nelayan masih terjebak terus dalam lingkaran kemiskinan (Kusnadi, 2002).

Untuk menangkap ikan, nelayan Sungsang memiliki beberapa jenis perahu, antara lain perahu tungkaan, sampan, jol, pompong, dan fiber. Setiap jenis kapal mempunyai spesifikasi dan kegunaannya masing-masing. Ukuran kapal bervariasi, sebagian besar berbobot 4-5 GT. Dalam hal ini tidak semua nelayan memiliki kapal. Biasanya pemilik perahu tidak melaut. Terdapat juga nelayan memiliki lebih dari satu perahu. Oleh karena itu, nakhoda dan awak kapal menganut sistem bagi hasil. Sedangkan untuk alat tangkap yang digunakan, terdapat beberapa jenis jaring ikan dan alat tangkap yang biasa digunakan oleh para nelayan Nelayan di Sungsang menggunakan berbagai jenis jaring untuk menangkap ikan. Salah satu jenis jaring yang umum digunakan adalah jaring insang atau gill net. Jaring ini terbuat dari benang yang kuat dan dilengkapi dengan mata jaring yang kecil. Selain jaring insang, nelayan di Sungsang juga menggunakan jaring tiga lapis atau trammel net.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan harus mulai mengoptimalkan potensi perkembangbiakan perikanan tangkap yang ada diperairan Sumatera Selatan. Karena ikan bisa menjadi salah satu ekspor terpenting industri kelautan dan perikanan Sumatera Selatan yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir sungsang. Nelayan di Sungsang kebanyakan melakukan penangkapan hanya disekitar wlayah perairan pantai yang tidak jauh dari sekitar perairan pantai. Saat ini penangkapan ikan kebanyakan menggunakan alat dan kapal tradisional dan skala kecil. Hal ini terlihat pada armada penangkapan ikan yang beroperasi dengan perahu motor tempel kecil.

Dalam konteks sumber daya perikanan, faktor pemasaran hasil laut juga memegang peranan penting dalam pembangunan perikanan di

Sumatera Selatan. Khusus pada penangkapan ikan tangkap, fasilitas bagian penjualan sangat erat kaitannya dengan keberadaan pelabuhan perikanan. Ini jelas. Salah satu fungsi pelabuhan adalah perekonomian perikanan yang mengintegrasikan darat dan laut, dan hal ini diperkirakan bisa mempengaruhi sektor kenaikan ekonomi di wilayah sekitar pelabuhan. Aktivitas perekonomian di kawasan pelabuhan terlihat jelas di Pusat Pelelangan Ikan (TPI). Pasar ikan, kawasan industri pelabuhan. Terdapat dua unit pelabuhan perikanan (PPI) di Sumsel, salah satunya adalah pelabuhan perikanan kelas Songsan B. Namun, di sebagian besar pelabuhan, TPI merupakan fasilitas ekonomi termurah yang tersedia. Nelayan TPI berperan penting dalam menjaga harga dan memasarkan hasil tangkapannya. Menurut Dinas Perikanan Provinsi Banyuasin, saat ini kondisi TPI Sungsang masih belum terlalu aktif dan operasionalnya belum maksimal, sehingga perlu dilakukan berbagai upaya agar aktivitas jual beli TPI dapat meningkat dan berdampak positif, dampak ekonomi terhadap masyarakat lokal.

Menurut pihak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Selatan mengakui potensi perikanan laut masih sangat melimpah. Namun keterbatasan alokasi anggaran di APBD menjadi persoalan untuk memaksimalkan potensi tersebut. Salah satu contohnya adalah untuk bantuan alat tangkap dan pendukung nelayan. Oleh sebab itu, pihak DKP sedang mengupayakan dana-dana lain dari luar APBD.

Pada dasarnya pemanfaatan perikanan laut masih belum termanfaatkan dengan baik di perairan Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu, penulisan ini bertujuan menciptakan strategi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan guna meningkatkan hasil penangkapan perikanan laut di Provinsi Sumatera Selatan guna mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir sungsang. Dengan cara ini, tercipta paradigma berpikir kritis yang dapat menggunakan konsep ini untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya alam yang lebih efektif.

1.2. Fokus dan Subfokus

1.2.1 Fokus

Penelitian ini berfokus kepada strategi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya pemanfaatan sumber daya ikan di perairan Sumatera Selatan guna mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir Sungsang.

1.2.1 Sub Fokus

Penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan hasil penangkapan ikan diperairan Provinsi Sumatera Selatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Sungsang. Sub Fokus penelitian sebagai berikut :

- a. Penerapan penangkapan ikan diperairan Provinsi Sumatera Selatan
- b. Strategi pemerintah dalam menerapkan penangkapan ikan diperairan Provinsi Sumatera Selatan guna mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir Sungsang.

1.3. Rumusan Masalah

Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi ikan cukup besar akan tetapi pemanfaatan penangkapan ikan belum termanfaatkan secara optimal. Saat ini penangkapan ikan masih dilakukan secara tradisional dan skala kecil serta terbatasnya anggaran di APBD menjadi persoalan untuk memaksimalkan potensi tersebut. Oleh karenanya diperlukan strategi dan upaya-upaya sebagai langkah peningkatan hasil tangkapan ikan yang ada di perairan Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan oleh penulis di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah penelitian ini dapat diuraikan menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana penerapan penangkapan ikan yang ada diperairan Provinsi Sumatera Selatan ?
- b. Bagaimana strategi pemerintah dalam penerapan penangkapan ikan di perairan Provinsi Sumatera Selatan guna mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir Sungsang ?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah menjawab rumusan masalah. Penulis menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis penerapan penangkapan ikan diperairan Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Untuk menganalisis strategi pemerintah dalam menerapkan penangkapan ikan diperairan Provinsi Sumatera Selatan guna mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir Sungsang.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat teoritis dan praktis penelitian ini, yaitu :

1.5.1 Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan dan kemampuan berpikir masyarakat pesisir Sungsang dalam memanfaatkan masa penangkapan ikan diperairan Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menambah wawasan akademik Studi Keamanan Maritim, khususnya yang berkaitan dengan penangkapan ikan.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan sebuah dorongan, dalam konteks pemanfaatan ikan diperairan Provinsi Sumatera Selatan. terutama dapat memberikan rekomendasi kepada:

- a. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan
- d. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- e. Nelayan.